



Evaluasi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Pondok Pesantren: Perspektif Empat Tingkatan Realitas Sosial George Ritzer

Muhammad Adib¹, Ni'matul Mukarromah², Hamdan Zulva^{3✉}

^{1,2,3}*Fakultas Pendidikan, Universitas Al Qolam Malang, Indonesia*

✉Corresponding email: hamdanzulva19@alqolam.ac.id

Histori Artikel:

Submit: 18 Juni 2026; Revisi: 30 Juli 2026; Diterima: 3 Agustus 2026

Publikasi: 8 Agustus 2026; Periode Terbit: Desember 2026

Doi: 10.23917/jkk.v5i3.1257

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Implementasinya pada lingkungan pondok pesantren memiliki karakteristik tersendiri karena pesantren memiliki sistem pendidikan berasrama, pola konsumsi kolektif, serta struktur kelembagaan dan aktivitas ekonomi internal yang khas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Program MBG di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky menggunakan perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana program dan pihak yang terlibat dalam implementasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengodean, kategorisasi, penyajian, dan interpretasi berdasarkan dimensi makro-objektif, makro-subjektif, mikro-objektif, dan mikro-subjektif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, implementasi MBG berjalan efektif melalui koordinasi yang baik antara pesantren dan SPPG, mekanisme distribusi yang relatif teratur, serta dukungan positif dari wali santri dan komunitas pesantren. Kedua, program memberikan manfaat sosial dalam pemenuhan kebutuhan gizi santri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi berupa penurunan aktivitas dan pendapatan kantin akibat perubahan pola konsumsi, serta konsekuensi operasional berupa sisa makanan dan peningkatan sampah kemasan. Ketiga, perspektif George Ritzer mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur kebijakan, nilai dan budaya pesantren, praktik operasional, serta pengalaman para aktor secara komprehensif. Penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi MBG yang adaptif terhadap karakteristik sosial, kelembagaan, ekonomi, dan budaya pesantren agar manfaat program dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, tata kelola program, nutrisi peserta didik, dinamika sosial-ekonomi, pendidikan berasrama.

Pendahuluan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas

pembangunan nasional yang sangat dipengaruhi oleh status gizi masyarakat, terutama pada kelompok usia sekolah.



Pemenuhan gizi yang optimal berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kesiapan belajar, serta peningkatan produktivitas individu pada masa mendatang. Atas dasar tersebut, berbagai negara mengembangkan program makan sekolah (school feeding programme) sebagai bagian dari kebijakan yang mengintegrasikan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga meningkatkan partisipasi sekolah, mengurangi kerentanan sosial, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan (Bundy et al., 2009).

Dalam beberapa dekade terakhir, program makan sekolah berkembang menjadi salah satu bentuk intervensi sosial yang diterapkan secara luas di berbagai negara. World Food Programme (WFP) melaporkan bahwa ratusan juta anak setiap tahun memperoleh manfaat dari program tersebut sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi lokal. Selain meningkatkan akses terhadap pangan bergizi, program makan sekolah juga berkontribusi dalam memperbaiki kehadiran siswa dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran sehingga menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial terbesar di dunia (World Food Programme, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program makan sekolah

memberikan manfaat yang tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pendidikan. Pemberian makanan bergizi secara teratur terbukti mampu meningkatkan keragaman konsumsi pangan, memperbaiki status gizi peserta didik, serta meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Dengan demikian, program makan sekolah dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan modal manusia karena memberikan manfaat yang bersifat multidimensional bagi peserta didik maupun masyarakat secara luas (Zenebe et al., 2018).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi sesuai standar gizi seimbang bagi peserta didik sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan program dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengolahan, distribusi, serta pengawasan mutu makanan sesuai pedoman nasional yang telah ditetapkan (Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025; Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2025).

Implementasi Program MBG didukung oleh berbagai regulasi dan pedoman teknis yang mengatur tata kelola penyelenggaraan, keamanan pangan, distribusi makanan, serta



mekanisme koordinasi antarinstansi. Namun demikian, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, efektivitas koordinasi, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan setiap lembaga dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, evaluasi implementasi menjadi bagian penting untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik (Hastuti & Hariyadi, 2026).

Sejumlah penelitian mengenai Program MBG menunjukkan bahwa implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antarlembaga, tata kelola operasional, distribusi logistik, serta akuntabilitas pelaksanaan di tingkat lapangan. Di sisi lain, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi, kesiapan belajar, dan efektivitas proses pembelajaran peserta didik apabila dilaksanakan secara konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Program MBG sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi pada tingkat satuan pendidikan (Nasir et al., 2026; Saputri & Utari, 2026).

Meskipun penelitian mengenai Program MBG terus berkembang, sebagian besar kajian masih berfokus pada sekolah formal dengan penekanan pada aspek efektivitas program, tata kelola, maupun manfaat gizi. Kajian

yang secara khusus membahas implementasi Program MBG pada lingkungan pondok pesantren masih relatif terbatas. Padahal, pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sekolah formal karena menerapkan sistem pendidikan berasrama, pola konsumsi kolektif, struktur organisasi yang khas, serta budaya kelembagaan yang kuat. Karakteristik tersebut memungkinkan munculnya dinamika implementasi kebijakan yang berbeda sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam (Agustini, 2025).

Selain berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi santri, implementasi Program MBG juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi yang telah berkembang di lingkungan pesantren. Sebelum program diterapkan, banyak pesantren memiliki unit usaha mikro berupa kantin yang menyediakan kebutuhan konsumsi harian santri. Setelah makanan disediakan melalui Program MBG, perubahan pola konsumsi santri dapat menyebabkan menurunnya aktivitas pembelian di kantin sehingga berdampak pada keberlangsungan usaha tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya menghasilkan manfaat bagi kelompok sasaran utama, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi terhadap lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan (Orbawati et al., 2025).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat



kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada efektivitas program, aspek kesehatan, tata kelola, atau evaluasi kebijakan secara umum. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana implementasi Program MBG memengaruhi dinamika organisasi, hubungan antaraktor, budaya kelembagaan, serta aktivitas ekonomi internal pesantren masih sangat terbatas. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan implementasi Program MBG secara lebih komprehensif dalam konteks kelembagaan pesantren (Hastuti & Hariyadi, 2026).

Untuk menjelaskan dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer, yaitu makro-objektif, makro-subjektif, mikro-objektif, dan mikro-subjektif. Perspektif ini memungkinkan implementasi kebijakan dipahami tidak hanya sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan interaksi antara struktur kebijakan, budaya organisasi, praktik operasional, dan persepsi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi Program MBG di lingkungan pesantren (Ritzer, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren

Jawharot Al Muzakky menggunakan perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan gizi pada lingkungan pesantren sekaligus memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan publik pada lembaga pendidikan berbasis asrama. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG agar lebih adaptif terhadap karakteristik kelembagaan, kondisi sosial, serta dinamika ekonomi lokal yang berkembang di lingkungan pesantren (Darma Dirawan & Sukriadi, 2026).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konteks nyata melalui pengalaman, persepsi, serta interaksi para aktor yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap makna di balik proses implementasi kebijakan sehingga dinamika sosial yang terjadi selama pelaksanaan program dapat dipahami secara komprehensif (Ismail, 2024).

Desain studi kasus evaluatif digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu



implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky. Desain ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara mendalam dalam konteks kelembagaan yang nyata sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antara kebijakan, organisasi, serta perilaku para pelaksana sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika implementasi program (Septiana, 2024).

Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky yang menjadi salah satu penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis melalui kemitraan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukosari 1. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena pesantren tersebut telah melaksanakan Program MBG secara aktif dan memiliki karakteristik kelembagaan yang memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dalam lingkungan pendidikan berbasis asrama. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian sebagai kasus yang relevan untuk memahami pelaksanaan Program MBG dalam konteks pesantren.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Informan terdiri atas Arif Kurniawan selaku pengurus santri putra, Isabella selaku

pengurus dapur pondok, dan Dia Novita selaku Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis. Ketiga informan dipilih karena memiliki peran strategis pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sehingga mampu memberikan informasi yang kaya dan sesuai dengan tujuan penelitian (Creswell, 2018).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan informan mengenai implementasi Program MBG. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi makanan di lingkungan pesantren, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen pendukung, seperti foto kegiatan, data penerima manfaat, laporan pelaksanaan, dan dokumen administratif lainnya. Kombinasi ketiga teknik tersebut memungkinkan diperolehnya informasi yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Creswell, 2018).

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari setiap informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui pencocokan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, selama proses penelitian seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan



menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi secara sukarela. Identitas informan digunakan hanya untuk kepentingan akademik dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan etika penelitian (Ismail, 2024).

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, pengodean, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsi, kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, setiap kategori dianalisis secara interpretatif untuk menemukan pola hubungan antartema sebelum disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar kategori sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Program MBG (Creswell, 2018).

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer, yaitu makro-objektif (macro-objective), makro-subjektif (macro-subjective), mikro-objektif (micro-objective), dan mikro-subjektif (micro-subjective). Perspektif ini digunakan untuk menginterpretasikan data secara sistematis dengan menghubungkan dimensi kebijakan, budaya organisasi, praktik operasional, serta persepsi individu yang terlibat dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Melalui pendekatan tersebut, evaluasi implementasi program dapat

dipahami secara lebih utuh karena memperhatikan hubungan antara struktur sosial dan tindakan para aktor dalam konteks kelembagaan pesantren (Ritzer, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky tidak hanya menggambarkan pelaksanaan program dari aspek administratif, tetapi juga memperlihatkan dinamika sosial yang muncul selama proses implementasi. Berdasarkan hasil analisis data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diinterpretasikan menggunakan perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer, ditemukan tiga temuan utama yang merepresentasikan keberhasilan implementasi, dampak yang ditimbulkan, serta kontribusi perspektif teoretis dalam menjelaskan implementasi Program MBG di lingkungan pesantren. Ketiga temuan tersebut disajikan sebagai berikut.

a. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky secara umum berjalan efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari terselenggaranya proses pendataan, penerimaan, distribusi, dan konsumsi makanan secara relatif teratur (Muchlis &



Siswanto, 2026). Pelaksanaan program juga didukung oleh koordinasi yang baik antara pihak pesantren dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukosari 1. Program MBG tidak hanya memberikan tambahan asupan makanan bagi santri, tetapi juga memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan gizi dalam lingkungan pendidikan berasrama (Fahrian & Putra, 2026). Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa program makan sekolah dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia (Bundy et al., 2009).

Pada tahap awal implementasi, penerima manfaat Program MBG di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky ditentukan berdasarkan data santri yang

tercatat dalam sistem EMIS. Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap data penerima, terjadi penyesuaian dengan memasukkan tenaga pendidik sebagai penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penerima manfaat mencapai 141 orang yang terdiri atas 110 santri dan 31 tenaga pendidik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan data administratif dengan kondisi aktual di lingkungan pesantren. Penyesuaian ini penting karena implementasi kebijakan pada tingkat lokal sering kali membutuhkan adaptasi agar tujuan program dapat diterapkan secara efektif sesuai karakteristik lembaga penerima manfaat (Hastuti & Hariyadi, 2026).

Tabel 1. Distribusi Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis

No.	Kelompok Penerima	Jumlah	Persentase
1	Santri	110	78,01 %
2	Tenaga pendidik	31	21,99%
Total	Penerima manfaat	141	100%

Berdasarkan Tabel 1, santri merupakan kelompok penerima manfaat terbesar, yaitu sebanyak 110 orang atau 78,01% dari keseluruhan penerima. Sementara itu, sebanyak 31 tenaga pendidik atau 21,99% turut memperoleh manfaat setelah dilakukan pendataan ulang. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di pesantren memiliki cakupan penerima yang relatif luas. Penambahan tenaga pendidik juga memperlihatkan adanya proses adaptasi dalam implementasi program, karena

pelaksanaan tidak sepenuhnya berhenti pada data awal yang tersedia. Dari perspektif evaluasi kebijakan, kemampuan melakukan penyesuaian data merupakan bagian penting dari responsivitas implementasi. Pendataan yang diperbarui memungkinkan distribusi makanan dilakukan berdasarkan kondisi aktual sehingga mengurangi potensi ketidaksesuaian antara jumlah makanan yang disediakan dan jumlah penerima. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi antara pihak pesantren dan SPPG



memiliki peran penting dalam menjaga ketepatan sasaran program (Adhantoro et al., 2026). Dengan demikian, keberadaan mekanisme verifikasi dan pembaruan data menjadi salah satu indikator yang mendukung efektivitas pelaksanaan MBG di lingkungan pesantren.

Selain ketepatan pendataan, efektivitas implementasi terlihat dari mekanisme koordinasi antara pihak Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky dan SPPG Sukosari 1. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dilakukan secara rutin untuk menyampaikan informasi mengenai jumlah penerima, jadwal pengiriman, penerimaan makanan, serta berbagai kendala teknis yang muncul. Salah satu media komunikasi yang digunakan adalah

grup WhatsApp yang memungkinkan informasi disampaikan dan ditanggapi secara cepat. Ketika terjadi kekurangan jumlah porsi makanan, pihak pesantren dapat segera menghubungi SPPG untuk mendapatkan penyelesaian (Khatimah et al., 2025). Demikian pula ketika terjadi kendala distribusi, informasi dapat segera diteruskan kepada pihak terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi mekanisme penyelesaian masalah dalam proses implementasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menempatkan komunikasi dan koordinasi sebagai unsur penting dalam keberhasilan implementasi Program MBG (Nasir et al., 2026).

Tabel 2. Mekanisme Koordinasi dalam Implementasi Program MBG

No.	Aspek Koordinasi	Pelaksanaan di Lapangan	Hasil
1	Pendataan penerima	Verifikasi dan pembaruan data	Jumlah penerima dapat disesuaikan
2	Jadwal distribusi	Komunikasi pesantren dengan SPPG	Distribusi berlangsung teratur
3	Kekurangan porsi	Dilaporkan kepada SPPG	Segera ditindaklanjuti
4	Kendala distribusi	Dikomunikasikan kepada pihak terkait	Kendala dapat diselesaikan
5	Media komunikasi	Grup WhatsApp dan komunikasi langsung	Respons relatif cepat
6	Evaluasi pelaksanaan	Komunikasi antara penanggung jawab dan SPPG	Perbaikan dapat dilakukan

Tabel 2 menunjukkan bahwa koordinasi antara pesantren dan SPPG berlangsung pada berbagai tahapan implementasi, mulai dari pendataan hingga penyelesaian kendala. Penggunaan media komunikasi yang sederhana tetapi responsif memungkinkan pihak pesantren menyampaikan permasalahan tanpa

melalui prosedur yang terlalu panjang. Kondisi tersebut sangat penting dalam program penyediaan makanan karena permasalahan seperti kekurangan porsi atau keterlambatan distribusi membutuhkan respons yang cepat agar tidak mengganggu penerimaan makanan oleh santri (Agustin et al., 2026). Koordinasi yang berlangsung



secara berkelanjutan juga menunjukkan bahwa hubungan antara pesantren dan SPPG tidak bersifat satu arah. Pihak pesantren tidak hanya berperan sebagai penerima makanan, tetapi juga memberikan informasi dan masukan mengenai pelaksanaan program (Adhantoro et al., 2026). Dengan demikian, mekanisme koordinasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *feedback mechanism* yang memungkinkan pelaksana melakukan koreksi terhadap permasalahan yang muncul. Temuan ini memperkuat hasil penelitian mengenai pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas implementasi MBG (Nasir et al., 2026).

Efektivitas implementasi Program MBG juga tercermin dari proses distribusi makanan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, makanan dikirim oleh SPPG Sukosari 1 dan diterima oleh penanggung jawab program di pesantren. Setelah dilakukan pengecekan, makanan kemudian dibagikan kepada santri dan tenaga pendidik sesuai jumlah penerima manfaat (Qomarrullah et al., 2025). Secara umum, proses tersebut berlangsung dengan lancar dan hanya ditemukan kendala distribusi dalam kondisi tertentu. Apabila terjadi kekurangan jumlah porsi, pihak pesantren segera menyampaikan informasi kepada SPPG untuk memperoleh tindak lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

mekanisme distribusi telah berjalan dengan tingkat responsivitas yang cukup baik. Keberadaan sistem distribusi yang teratur menjadi aspek penting karena keberhasilan program makan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara memastikan makanan sampai kepada penerima pada waktu dan jumlah yang sesuai (World Food Programme, 2024).

Selain aspek teknis, penerimaan sosial dari komunitas pesantren menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali santri memberikan respons positif terhadap keberadaan Program MBG. Para wali santri merasa terbantu karena anak-anak mereka memperoleh tambahan makanan berupa lauk, buah, dan susu tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan (Azzahra et al., 2025). Respons tersebut menunjukkan bahwa manfaat program dirasakan tidak hanya oleh penerima langsung, tetapi juga oleh keluarga santri. Dukungan tersebut menjadi penting karena kebijakan publik yang diterapkan pada lingkungan pendidikan membutuhkan penerimaan dari berbagai kelompok yang berinteraksi dengan program. Penerimaan masyarakat terhadap MBG juga dapat memperkuat legitimasi sosial program dan mendukung keberlanjutan implementasinya di tingkat lokal (Hastuti & Hariyadi, 2026).

Tabel 3. Respons Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Program MBG



No.	Pemangku Kepentingan	Bentuk Respons	Kontribusi terhadap Program
1	Santri	Menerima makanan secara rutin	Mendukung pencapaian sasaran gizi
2	Tenaga pendidik	Turut menerima manfaat	Memperluas cakupan penerima
3	Pengelola pesantren	Mendukung penerimaan dan distribusi	Menjamin kelancaran pelaksanaan
4	SPPG Sukosari 1	Menyediakan dan mengirim makanan	Menjamin ketersediaan makanan
5	Wali santri	Memberikan respons positif	Memperkuat dukungan sosial
6	Penanggung jawab program	Mengelola distribusi dan komunikasi	Menjaga koordinasi internal

Berdasarkan Tabel 3, implementasi Program MBG melibatkan beberapa kelompok dengan fungsi yang saling melengkapi. SPPG Sukosari 1 menjalankan fungsi penyediaan dan distribusi makanan, sedangkan pihak pesantren bertanggung jawab memastikan makanan diterima dan disalurkan kepada penerima manfaat. Santri dan tenaga pendidik berperan sebagai penerima manfaat, sementara wali santri memberikan dukungan sosial terhadap keberadaan program (Adhantoro et al., 2026). Pola tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi MBG merupakan hasil dari interaksi berbagai aktor, bukan semata-mata hasil kerja satu institusi (Basuki et al., 2026). Dukungan wali santri memiliki arti penting karena dapat memperkuat penerimaan program di tingkat keluarga. Sementara itu, keterlibatan pengelola pesantren menjadi faktor penting dalam mengintegrasikan program dengan aktivitas pendidikan dan kehidupan berasrama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG berlangsung dalam suatu

ekosistem kelembagaan yang membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam penguatan tata kelola Program MBG (Hastuti & Hariyadi, 2026).

Hal menarik lainnya adalah bahwa Program MBG tidak menggantikan sistem konsumsi yang telah berjalan di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky. Dapur pondok tetap menjalankan aktivitas penyediaan makanan untuk kebutuhan santri di luar waktu pelaksanaan MBG (Manalu et al., 2026). Dengan demikian, program pemerintah berfungsi sebagai tambahan dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan berjalan berdampingan dengan sistem konsumsi internal pesantren. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat beradaptasi dengan sistem kelembagaan yang telah berkembang sebelumnya. Dalam konteks pesantren, pola konsumsi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengelolaan santri secara keseluruhan



(Albaburrahim et al., 2025). Oleh karena itu, kemampuan program untuk berintegrasi dengan sistem yang telah ada menjadi salah satu faktor yang mendukung penerimaan dan keberlanjutan implementasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky dapat dikategorikan berjalan efektif. Efektivitas tersebut tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu ketepatan pelaksanaan, efektivitas koordinasi, dan dukungan sosial (Agustini, 2025). Ketepatan pelaksanaan ditunjukkan melalui proses pendataan dan distribusi makanan yang relatif teratur. Efektivitas koordinasi terlihat dari komunikasi yang responsif antara pesantren dan SPPG dalam menangani berbagai kendala teknis. Sementara itu, dukungan sosial terlihat dari penerimaan positif pengelola pesantren, tenaga pendidik, santri, dan wali santri terhadap program (Fahrian & Putra, 2026). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan program makan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan, tetapi juga oleh kualitas sistem pelaksanaan dan dukungan dari lingkungan penerima manfaat (Darma Dirawan & Sukriadi, 2026).

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Program MBG di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky tidak dapat dipahami hanya berdasarkan kemampuan program dalam menyediakan makanan bergizi. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kemampuan pelaksana dalam

membangun koordinasi, menyesuaikan mekanisme program dengan kondisi lokal, serta memperoleh dukungan dari komunitas pesantren (Muchlis & Siswanto, 2026). Meskipun masih diperlukan evaluasi terhadap aspek lain, seperti preferensi menu, pengelolaan sisa makanan, dan dampak ekonomi terhadap kantin pesantren, hasil penelitian pada aspek implementasi menunjukkan bahwa mekanisme dasar Program MBG telah berjalan secara efektif. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan implementasi yang adaptif terhadap karakteristik lembaga pendidikan, khususnya pesantren yang memiliki sistem organisasi dan kehidupan sosial yang berbeda dari sekolah formal pada umumnya.

b. Implementasi Program Memberikan Dampak Sosial dan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky tidak hanya memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan gizi santri, tetapi juga menimbulkan perubahan pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren. Program MBG telah mengubah sebagian pola konsumsi santri karena kebutuhan makanan tertentu yang sebelumnya dipenuhi melalui pembelian di kantin kini sebagian telah tersedia melalui program pemerintah (Wahyuni et al., 2026). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan publik dapat



menghasilkan konsekuensi yang lebih luas daripada tujuan awalnya. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat pada saat yang sama dapat memengaruhi hubungan konsumsi, aktivitas ekonomi, dan keberlangsungan unit usaha yang telah berkembang di lingkungan institusi (Serang et al., 2025). Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa program makan sekolah memiliki dampak multidimensional yang tidak terbatas pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dapat berhubungan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya (Bundy et al., 2009).

Dari aspek sosial, kehadiran Program MBG memperoleh respons positif dari santri, tenaga pendidik, pengelola pesantren, dan wali santri. Santri memperoleh makanan berupa makanan utama beserta komponen tambahan seperti buah dan susu,

sedangkan wali santri merasa terbantu karena sebagian kebutuhan konsumsi anak selama berada di pesantren telah dipenuhi melalui program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa MBG memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat maupun keluarganya. Program juga memperkuat persepsi bahwa pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari proses pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia (Rahmah et al., 2025). Dengan demikian, manfaat sosial program tidak hanya berkaitan dengan makanan yang diterima, tetapi juga dengan terbentuknya persepsi positif terhadap perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan program makan sekolah yang semakin dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial dan pembangunan modal manusia (World Food Programme, 2024).

Tabel 4. Dampak Sosial Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

No.	Aspek Sosial	Temuan Penelitian	Dampak yang Teridentifikasi
1	Pemenuhan kebutuhan pangan	Santri memperoleh makanan secara rutin	Mendukung pemenuhan kebutuhan gizi
2	Beban keluarga	Wali santri tidak perlu menanggung biaya tambahan untuk makanan program	Memberikan manfaat ekonomi tidak langsung bagi keluarga
3	Penerimaan program	Wali santri dan pengelola pesantren memberikan respons positif	Memperkuat legitimasi sosial program
4	Hubungan antarpelaksana	Pesantren dan SPPG berkoordinasi dalam pelaksanaan	Memperkuat kerja sama kelembagaan
5	Aktivitas konsumsi santri	Sebagian kebutuhan makanan dipenuhi melalui MBG	Mengubah pola konsumsi santri
6	Kehidupan pesantren	MBG berjalan berdampingan dengan sistem konsumsi internal	Mendorong adaptasi kelembagaan

Tabel 4 memperlihatkan bahwa dampak sosial Program MBG terjadi

pada beberapa tingkat. Pada tingkat individu, santri memperoleh akses

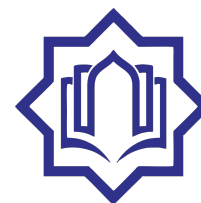


terhadap makanan yang disediakan secara rutin sehingga kebutuhan pangan mereka menjadi lebih terjamin (Ismail, 2024). Pada tingkat keluarga, wali santri merasakan manfaat karena terdapat sebagian kebutuhan konsumsi anak yang tidak lagi harus dipenuhi melalui pengeluaran tambahan. Pada tingkat kelembagaan, program mendorong terjadinya koordinasi antara pesantren dan SPPG serta mengharuskan pengelola pesantren menyesuaikan sistem internal dengan keberadaan program (Widyasari et al., 2025). Perubahan pola konsumsi santri juga menjadi konsekuensi sosial yang penting karena kebiasaan membeli makanan di kantin sebagian berkurang setelah kebutuhan makanan tertentu tersedia melalui MBG (Khatimah et al., 2025). Dengan demikian, dampak sosial program bersifat berlapis, mulai dari manfaat langsung bagi santri hingga perubahan interaksi dan pola konsumsi dalam komunitas pesantren. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat program makan sekolah dapat melampaui sasaran gizi dan berhubungan dengan kondisi sosial penerima manfaat secara lebih luas (World Food Programme, 2024).

Meskipun memberikan manfaat sosial yang positif, penelitian juga menemukan adanya perubahan perilaku konsumsi santri setelah Program MBG diterapkan. Sebelum program berjalan, santri memiliki kebiasaan membeli makanan atau jajanan tambahan di kantin pesantren sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi sehari-hari. Setelah memperoleh makanan melalui MBG

secara rutin, sebagian kebutuhan tersebut telah terpenuhi sehingga frekuensi pembelian di kantin mengalami penurunan (Septiana, 2024). Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari hadirnya sumber makanan baru dalam lingkungan pesantren. Dari perspektif sosial, kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perilaku individu melalui perubahan struktur kesempatan dan pilihan konsumsi (Furkan et al., 2025). Dalam perspektif empat tingkatan realitas sosial Ritzer, perubahan tersebut dapat ditempatkan pada dimensi mikro-objektif karena terlihat melalui perubahan perilaku konsumsi santri yang kemudian menghasilkan konsekuensi lebih luas terhadap lingkungan sosial dan ekonomi pesantren (Ritzer, 2011).

Perubahan pola konsumsi tersebut selanjutnya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi internal pesantren. Salah satu unit usaha yang terdampak adalah kantin yang dikelola oleh pengasuh pesantren. Sebelum MBG diterapkan, kantin memperoleh pendapatan dari pembelian makanan dan jajanan oleh santri (Wahyuni et al., 2026). Setelah program berjalan, jumlah pembelian mengalami penurunan karena sebagian kebutuhan konsumsi santri telah dipenuhi oleh makanan yang diberikan secara gratis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *policy spillover*, yaitu konsekuensi kebijakan yang muncul pada sektor atau kelompok yang bukan merupakan sasaran utama kebijakan (Udiana et al., 2025). Dalam



penelitian ini, tujuan utama MBG adalah pemenuhan gizi santri, sedangkan perubahan pendapatan kantin

merupakan konsekuensi tidak langsung dari perubahan perilaku konsumsi yang ditimbulkan oleh program.

Tabel 5. Perubahan Aktivitas Ekonomi Kantin Sebelum dan Setelah Implementasi MBG

No.	Aspek Ekonomi	Sebelum MBG	Setelah MBG	Dampak
1	Sumber konsumsi santri	Makanan dari dapur dan pembelian kantin	Makanan dari MBG, dapur, dan kantin	Pilihan konsumsi berubah
2	Frekuensi pembelian kantin	Relatif lebih tinggi	Mengalami penurunan	Aktivitas transaksi berkurang
3	Permintaan makanan/jajanan	Sebagian dipenuhi melalui kantin	Sebagian kebutuhan dipenuhi MBG	Permintaan kantin menurun
4	Pendapatan kantin	Menjadi bagian dari pemasukan unit usaha	Mengalami penurunan	Tekanan terhadap keberlanjutan usaha
5	Peran kantin	Menyediakan makanan tambahan bagi santri	Tetap beroperasi tetapi dengan permintaan lebih rendah	Membutuhkan adaptasi usaha
6	Pola konsumsi santri	Lebih bergantung pada pembelian tambahan	Lebih banyak memanfaatkan makanan program	Terjadi perubahan perilaku konsumsi

Tabel 5 menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang paling nyata berada pada perubahan aktivitas kantin pesantren. Sebelum MBG diterapkan, pembelian makanan dan jajanan oleh santri menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Setelah program berjalan, sebagian kebutuhan tersebut telah dipenuhi melalui makanan yang diberikan secara gratis sehingga permintaan terhadap produk kantin mengalami penurunan (Qomarrullah et al., 2025). Penurunan transaksi tersebut kemudian berdampak pada pendapatan unit usaha. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dari perspektif kelompok sasaran tidak selalu berarti tidak adanya konsekuensi bagi kelompok lain. Dalam kasus ini, santri memperoleh manfaat berupa akses

makanan bergizi, sementara pengelola kantin menghadapi perubahan kondisi pasar internal pesantren. Oleh karena itu, evaluasi MBG perlu memperhatikan distribusi manfaat dan konsekuensi kebijakan secara lebih luas, termasuk terhadap unit usaha lokal yang sebelumnya mendukung kebutuhan konsumsi peserta didik (Fatimah et al., 2024). Pendekatan semacam ini penting dalam evaluasi kebijakan agar keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan output utama, tetapi juga berdasarkan dampak yang muncul pada lingkungan implementasinya.

Meskipun terjadi penurunan aktivitas ekonomi kantin, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak menyebabkan penghentian operasional unit usaha. Kantin tetap menjadi bagian dari



ekosistem ekonomi pesantren dan masih dapat memenuhi kebutuhan konsumsi yang tidak tersedia melalui MBG (Muchlis & Siswanto, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan permintaan tidak serta-merta menghilangkan fungsi kantin, tetapi mengubah posisi dan pola pemanfaatannya (Basuki et al., 2026). Dalam konteks tersebut, unit usaha pesantren menghadapi kebutuhan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Adaptasi dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan lingkungan ekonomi yang muncul akibat implementasi kebijakan (Qomarrullah et al., 2025). Temuan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan publik yang masuk ke dalam institusi dengan sistem ekonomi internal perlu mempertimbangkan keberadaan aktivitas ekonomi yang telah berkembang sebelum kebijakan diterapkan.

Dampak ekonomi tersebut menjadi semakin penting karena kantin tidak berdiri sebagai entitas ekonomi yang sepenuhnya terpisah dari kehidupan pesantren. Unit usaha tersebut merupakan bagian dari aktivitas kelembagaan yang telah menyediakan kebutuhan santri sebelum adanya MBG. Oleh karena itu, perubahan pendapatan kantin dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan ekosistem ekonomi internal pesantren. Program MBG pada satu sisi memberikan manfaat sosial berupa peningkatan akses terhadap makanan bergizi, tetapi pada sisi lain mengubah distribusi permintaan terhadap produk makanan yang

sebelumnya tersedia melalui mekanisme pasar internal (Manalu et al., 2026). Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi MBG karena menunjukkan bahwa program memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan pada tingkat kelembagaan. Kebijakan makan bergizi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga berinteraksi dengan sistem konsumsi dan ekonomi yang telah ada sebelumnya.

Selain perubahan aktivitas ekonomi, penelitian menemukan adanya konsekuensi lingkungan yang berkaitan dengan meningkatnya volume sisa makanan dan kemasan. Makanan yang tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh santri menghasilkan sisa makanan, terutama ketika menu tertentu kurang sesuai dengan preferensi penerima manfaat. Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian adalah menu ikan lele yang kurang diminati oleh sebagian santri karena aroma yang dianggap kurang sesuai dengan selera mereka. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian makanan tidak habis dikonsumsi dan berpotensi meningkatkan jumlah limbah makanan (Mozin et al., 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program makan tidak hanya bergantung pada kandungan gizi makanan yang disediakan, tetapi juga pada tingkat penerimaan penerima manfaat terhadap menu. Penelitian mengenai program makan sekolah menunjukkan bahwa penerimaan terhadap makanan merupakan salah satu aspek penting



yang memengaruhi pemanfaatan makanan dan pencapaian tujuan gizi (Zenebe et al., 2018).

Tabel 6. Konsekuensi Implementasi MBG terhadap Lingkungan Pesantren

No	Konsekuensi	Kondisi yang Ditemukan	Kelompok/Lingkungan Terdampak	Implikasi
1	Perubahan pola konsumsi	Pembelian jajanan di kantin berkurang	Santri dan pengelola kantin	Aktivitas ekonomi berubah
2	Penurunan transaksi kantin	Permintaan terhadap produk kantin menurun	Unit usaha pesantren	Pendapatan kantin menurun
3	Sisa makanan	Sebagian menu tidak habis dikonsumsi	Santri dan pengelola program	Membutuhkan pengelolaan limbah
4	Sampah kemasan	Bertambah setelah distribusi makanan	Lingkungan pesantren	Membutuhkan pengelolaan sampah
5	Adaptasi kelembagaan	Sistem MBG berjalan bersama dapur pesantren	Pengelola pesantren	Membutuhkan penyesuaian operasional
6	Manfaat gizi	Santri memperoleh makanan secara rutin	Santri	Mendukung pemenuhan kebutuhan gizi

Berdasarkan Tabel 6, implementasi MBG menghasilkan kombinasi antara manfaat dan konsekuensi yang perlu dikelola secara bersamaan. Manfaat utama terlihat dari tersedianya makanan bagi santri, sedangkan konsekuensi muncul dalam bentuk perubahan pola konsumsi, penurunan aktivitas ekonomi kantin, serta peningkatan sisa makanan dan kemasan (Albaburrahim et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis karena perubahan pada satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya (Fatimah et al., 2024). Pemberian makanan secara gratis mengurangi kebutuhan pembelian makanan tertentu, perubahan tersebut memengaruhi pendapatan kantin, sedangkan makanan yang tidak sesuai preferensi dapat meningkatkan sisa makanan. Dengan demikian, evaluasi

program perlu menggunakan perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan hubungan antara manfaat, perilaku penerima manfaat, dan konsekuensi terhadap lingkungan implementasi (Azzahra et al., 2025). Dalam konteks pesantren, hubungan tersebut menjadi penting karena aktivitas pendidikan, konsumsi, dan ekonomi berlangsung dalam ruang kelembagaan yang sama.

Jika dikaitkan dengan perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer, dampak sosial dan ekonomi tersebut menunjukkan hubungan antara struktur kebijakan dan perilaku aktor. Program MBG sebagai struktur kebijakan berada pada ranah makro-objektif, sedangkan perubahan persepsi masyarakat terhadap manfaat program dapat dikaitkan dengan ranah makro-subjektif. Pada tingkat mikro-objektif,



perubahan tersebut terlihat melalui berkurangnya pembelian makanan di kantin dan meningkatnya pemanfaatan makanan yang disediakan program. Selanjutnya, pengalaman pengelola kantin yang merasakan penurunan pendapatan serta pengalaman pengelola pesantren dalam menghadapi perubahan sistem konsumsi merepresentasikan dimensi mikro-subjektif (Muchlis & Siswanto, 2026). Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa satu kebijakan dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda bagi aktor yang berbeda (Ritzer, 2011).

Dengan demikian, implementasi Program MBG di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky memberikan dampak sosial yang cenderung positif, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan santri, memberikan manfaat bagi keluarga, dan memperkuat penerimaan sosial terhadap program. Namun, dari sisi ekonomi, terdapat konsekuensi yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya penurunan aktivitas dan pendapatan unit usaha kantin akibat perubahan pola konsumsi santri (Agustini, 2025). Di samping itu, terdapat konsekuensi operasional dan lingkungan berupa sisa makanan serta peningkatan sampah kemasan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak lanjutan terhadap lingkungan sosial dan ekonomi tempat program diterapkan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menghasilkan manfaat dan konsekuensi secara bersamaan. Manfaat utama berupa peningkatan akses terhadap makanan bergizi perlu dipertahankan, sedangkan konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi dan lingkungan perlu dikelola melalui pendekatan yang adaptif (Qomarrullah et al., 2025). Dalam konteks Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky, keberadaan kantin sebagai unit usaha mikro menunjukkan bahwa implementasi MBG perlu mempertimbangkan karakteristik ekonomi lokal agar tidak mengabaikan keberadaan aktivitas usaha yang telah berkembang sebelumnya. Evaluasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek gizi, sosial, ekonomi, dan lingkungan akan membantu memastikan bahwa pengembangan Program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi komunitas pesantren.

c. Perspektif George Ritzer Menjelaskan Implementasi Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan keberhasilan distribusi makanan. Implementasi program melibatkan struktur kebijakan, nilai dan penerimaan sosial, praktik operasional, serta



pengalaman individu yang saling berhubungan. Untuk memahami hubungan tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer, yaitu makro-objektif, makro-subjektif, mikro-objektif, dan mikro-subjektif (Khatimah et al., 2025). Perspektif tersebut memungkinkan implementasi kebijakan dipahami sebagai hubungan dinamis antara struktur sosial dan tindakan aktor, bukan sekadar proses administratif yang berlangsung secara linear (Ritzer, 2011).

Pada dimensi makro-objektif, implementasi MBG tercermin dalam keberadaan struktur kebijakan, mekanisme kelembagaan, pembagian peran, pendataan penerima manfaat,

serta hubungan kerja antara Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky dan SPPG Sukosari 1 (Fahrian & Putra, 2026). Struktur tersebut memberikan kerangka bagi pelaksanaan program sehingga proses penyediaan dan distribusi makanan memiliki prosedur yang dapat diikuti oleh para pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SPPG sebagai penyedia makanan dan pesantren sebagai lembaga penerima manfaat membentuk hubungan kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Struktur tersebut juga didukung oleh pedoman tata kelola yang mengatur mekanisme penyelenggaraan Program MBG pada tingkat nasional (Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025).

Tabel 7. Implementasi Program MBG pada Dimensi Makro-Objektif

No.	Unsur Struktur	Temuan Penelitian	Peran dalam Implementasi	Implikasi
1	Kebijakan MBG	Program diterapkan di pesantren	Menjadi dasar pelaksanaan	Memberikan arah program
2	SPPG Sukosari 1	Menyediakan dan mengirim makanan	Sebagai penyedia layanan	Menjamin ketersediaan makanan
3	Pesantren	Menerima dan mendistribusikan makanan	Sebagai pelaksana lokal	Menjamin makanan sampai kepada penerima
4	Data penerima	110 santri dan 31 tenaga pendidik	Menentukan sasaran program	Mendukung ketepatan distribusi
5	Koordinasi	Komunikasi pesantren dan SPPG	Menyelesaikan kendala	Meningkatkan responsivitas
6	Sistem konsumsi internal	Dapur pondok tetap berjalan	Menyesuaikan MBG dengan sistem yang ada	Mendukung keberlanjutan program

Tabel 7 memperlihatkan bahwa dimensi makro-objektif dalam implementasi MBG dibentuk oleh struktur yang saling berhubungan. Kebijakan nasional memberikan

kerangka umum, SPPG menjalankan fungsi penyediaan makanan, sedangkan pesantren menjalankan fungsi penerimaan dan distribusi pada tingkat lokal. Keberadaan data penerima



manfaat juga menjadi bagian penting dari struktur implementasi karena menentukan jumlah makanan yang harus disediakan (Udiana et al., 2025). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur tersebut tidak bersifat sepenuhnya statis. Penambahan tenaga pendidik sebagai penerima manfaat setelah dilakukan pendataan ulang menunjukkan adanya penyesuaian pada tingkat lokal. Dengan demikian, struktur kebijakan menyediakan kerangka dasar, tetapi pelaksana tetap memiliki ruang untuk melakukan adaptasi berdasarkan kondisi nyata (Furkan et al., 2025). Temuan ini relevan dengan kajian implementasi MBG yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh tata kelola, koordinasi, dan kemampuan aktor dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik (Nasir et al., 2026).

Dimensi kedua adalah makro-subjektif, yang berkaitan dengan nilai,

norma, keyakinan, dan pemaknaan kolektif yang berkembang dalam lingkungan sosial. Pada konteks penelitian ini, dimensi makro-subjektif terlihat dari penerimaan komunitas pesantren terhadap Program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dipandang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kesehatan dan kesejahteraan santri. Wali santri memberikan respons positif karena program membantu menyediakan makanan bagi anak-anak mereka tanpa tambahan biaya. Penerimaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan program dapat diterima dan dipahami secara positif oleh komunitas pesantren. Dukungan sosial menjadi penting karena implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam ruang yang netral, tetapi berada dalam lingkungan yang memiliki nilai, norma, dan budaya tertentu (Ritzer, 2011).

Tabel 8. Implementasi Program MBG pada Dimensi Makro-Subjektif

No.	Unsur Nilai dan Budaya	Temuan Penelitian	Bentuk Pemaknaan	Dampak terhadap Implementasi
1	Pemenuhan gizi	Program dipandang membantu kebutuhan pangan santri	MBG dianggap bermanfaat	Meningkatkan penerimaan program
2	Kesehatan santri	Makanan bergizi dianggap mendukung kesehatan	Kesehatan dipandang sebagai bagian dari pendidikan	Memperkuat legitimasi program
3	Dukungan wali santri	Wali santri memberikan respons positif	Program dianggap membantu keluarga	Meningkatkan dukungan sosial
4	Nilai pendidikan pesantren	Tidak ditemukan pertentangan dengan program	MBG dipandang selaras dengan pembinaan santri	Mempermudah integrasi program
5	Persepsi terhadap pemerintah	Program dipahami sebagai bentuk perhatian pemerintah	Kebijakan memperoleh makna positif	Memperkuat penerimaan sosial
6	Kepentingan bersama	Gizi dipandang sebagai kebutuhan santri	Program dipahami sebagai manfaat kolektif	Mendukung keberlanjutan



Berdasarkan Tabel 8, dimensi makro-subjektif menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MBG tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh makna yang diberikan komunitas terhadap program tersebut. Penerimaan positif dari wali santri dan pengelola pesantren menunjukkan bahwa program memperoleh legitimasi sosial. Hal ini penting karena kebijakan yang secara administratif telah dirancang dengan baik belum tentu berjalan efektif apabila tidak memperoleh penerimaan dari lingkungan sosial tempat kebijakan diterapkan (Wahyuni et al., 2026). Dalam penelitian ini, tidak ditemukan adanya konflik antara tujuan MBG dengan nilai-nilai yang berkembang di pesantren. Sebaliknya, program dipahami sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan dan kesejahteraan santri. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesesuaian antara tujuan kebijakan dan nilai kelembagaan dapat menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi implementasi. Dukungan masyarakat juga telah diidentifikasi

sebagai salah satu unsur yang penting dalam keberlangsungan implementasi Program MBG (Hastuti & Hariyadi, 2026).

Dimensi ketiga adalah mikro-objektif, yang berkaitan dengan tindakan nyata, perilaku, dan interaksi yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, dimensi mikro-objektif terlihat pada proses penerimaan makanan, distribusi kepada santri dan tenaga pendidik, komunikasi ketika terjadi kekurangan porsi, serta perubahan pola konsumsi santri (Agustin et al., 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi makanan berjalan relatif lancar. Apabila terjadi permasalahan, pihak pesantren menyampaikannya kepada SPPG untuk memperoleh penyelesaian. Pada saat yang sama, keberadaan MBG juga mengubah perilaku konsumsi sebagian santri. Mereka tidak lagi membeli makanan atau jajanan di kantin dengan intensitas yang sama seperti sebelum program diterapkan.

Tabel 9. Implementasi Program MBG pada Dimensi Mikro-Objektif dan Mikro-Subjektif

No.	Dimensi	Temuan Empiris	Bentuk Tindakan/Pengalaman	Konsekuensi
1	Mikro-objektif	Makanan diterima dan dibagikan	Distribusi kepada penerima manfaat	Kebutuhan makanan terpenuhi
2	Mikro-objektif	Kekurangan porsi dikomunikasikan	Penanggung jawab menghubungi SPPG	Masalah dapat ditangani
3	Mikro-objektif	Pembelian kantin menurun	Santri mengurangi pembelian jajanan	Pendapatan kantin menurun
4	Mikro-objektif	Sebagian menu tidak disukai	Makanan tidak selalu habis	Muncul sisa makanan
5	Mikro-subjektif	Pelaksana menilai MBG bermanfaat	Program dimaknai positif	Mendukung keberlanjutan



No.	Dimensi	Temuan Empiris	Bentuk Tindakan/Pengalaman	Konsekuensi
6	Mikro-subjektif	Pengelola kantin merasakan dampak	Pendapatan dipersepsikan menurun	Muncul kebutuhan adaptasi usaha
7	Mikro-subjektif	Pengelola dapur tetap bekerja	MBG tidak menggantikan dapur pondok	Sistem konsumsi berjalan berdampingan

Tabel 9 menunjukkan hubungan yang lebih kompleks antara tindakan nyata dan pengalaman subjektif para aktor. Pada dimensi mikro-objektif, keberhasilan program terlihat melalui distribusi makanan yang berjalan relatif lancar dan respons terhadap kendala teknis. Namun, pada dimensi yang sama juga ditemukan perubahan perilaku konsumsi santri yang berdampak terhadap aktivitas kantin. Sementara itu, dimensi mikro-subjektif menunjukkan bahwa pengalaman terhadap program berbeda antarpelaku. Pengelola pesantren dan pelaksana MBG cenderung memandang program secara positif karena manfaatnya terhadap pemenuhan gizi santri, sedangkan pengelola kantin mengalami konsekuensi ekonomi akibat berkurangnya transaksi (Maryani & Syahputra, 2025). Perbedaan pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa suatu kebijakan dapat menghasilkan makna dan konsekuensi yang berbeda bagi aktor yang berada dalam lingkungan implementasi yang sama. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya pendekatan evaluasi yang tidak hanya melihat keberhasilan program dari perspektif penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan pengalaman kelompok lain yang

terdampak oleh kebijakan (Serang et al., 2025).

Keempat dimensi tersebut tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling berhubungan. Struktur kebijakan pada dimensi makro-objektif menyediakan mekanisme yang memungkinkan MBG diterapkan di pesantren. Struktur tersebut kemudian memperoleh penguatan dari dimensi makro-subjektif melalui penerimaan dan dukungan komunitas pesantren. Dukungan sosial tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan operasional berlangsung pada tingkat mikro-objektif (Rahmah et al., 2025). Selanjutnya, pengalaman para pelaksana, santri, dan pengelola unit usaha membentuk dimensi mikro-subjektif yang menunjukkan bagaimana kebijakan dimaknai oleh individu. Hubungan antardimensi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang bersifat multilevel dan interaktif, bukan hubungan sederhana antara kebijakan dan hasil program.

Jika digambarkan secara konseptual, hubungan tersebut dapat dipahami sebagai suatu alur yang saling memengaruhi. Makro-objektif menyediakan struktur kebijakan dan mekanisme kelembagaan; makro-subjektif memberikan legitimasi melalui



nilai, norma, dan penerimaan sosial; mikro-objektif menerjemahkan struktur dan nilai tersebut ke dalam tindakan sehari-hari; sedangkan mikro-subjektif memperlihatkan pengalaman, persepsi, dan pemaknaan individu terhadap implementasi program (Risnawati et al., 2026). Keempat dimensi tersebut kemudian menghasilkan umpan balik terhadap implementasi. Misalnya, pengalaman pengelola kantin mengenai penurunan pendapatan dapat menjadi informasi penting bagi evaluasi kebijakan meskipun dampak tersebut bukan merupakan tujuan utama Program MBG. Kerangka Ritzer dengan demikian membantu memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat berjalan bersamaan dengan munculnya konsekuensi yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Ritzer, 2011).

Perspektif tersebut juga membantu menjelaskan mengapa Program MBG dapat dinilai berhasil dari satu sudut pandang, tetapi tetap membutuhkan evaluasi dari sudut pandang lain. Dari perspektif struktur kebijakan dan penerima manfaat, program telah berjalan dengan baik karena makanan tersedia dan didistribusikan secara rutin. Dari perspektif sosial, program memperoleh penerimaan positif dari komunitas pesantren (Habibah & Nurmasitah, 2026). Namun, dari perspektif ekonomi mikro, perubahan pola konsumsi menimbulkan tekanan terhadap unit usaha kantin. Dengan demikian, evaluasi implementasi tidak seharusnya hanya menggunakan satu indikator keberhasilan. Program perlu

dilihat berdasarkan keterkaitan antara tujuan kebijakan dan konsekuensi yang muncul pada lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut dilaksanakan (Sakina et al., 2025). Pendekatan semacam ini sejalan dengan kebutuhan evaluasi Program MBG yang tidak hanya menilai manfaat gizi, tetapi juga aspek tata kelola dan keberlanjutan implementasinya (Darma Dirawan & Sukriadi, 2026).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perspektif George Ritzer memberikan kontribusi analitis dalam mengidentifikasi hubungan antara struktur, budaya, tindakan, dan pengalaman dalam implementasi MBG. Tanpa perspektif tersebut, fenomena seperti perubahan pola konsumsi santri atau penurunan pendapatan kantin dapat dipandang sebagai temuan tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan implementasi program. Melalui kerangka empat tingkatan realitas sosial, fenomena tersebut dapat ditempatkan sebagai konsekuensi yang muncul dari interaksi antara struktur kebijakan dan tindakan aktor (Widyasari et al., 2025). Struktur kebijakan menyediakan makanan secara gratis, santri kemudian menyesuaikan perilaku konsumsinya, perubahan tersebut memengaruhi aktivitas kantin, dan pengelola kantin mengalami konsekuensi ekonomi. Rangkaian tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara tingkat makro dan mikro yang menjadi inti dari analisis realitas sosial Ritzer.

Dengan demikian, perspektif George Ritzer dapat digunakan untuk menjelaskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara lebih



komprehensif karena mampu mengintegrasikan berbagai level realitas sosial yang ditemukan dalam penelitian (Septiana, 2024). Makro-objektif menjelaskan struktur dan mekanisme kebijakan, makro-subjektif menjelaskan nilai serta penerimaan sosial, mikro-objektif menjelaskan praktik dan perubahan perilaku, sedangkan mikro-subjektif menjelaskan persepsi serta pengalaman individu. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi antara struktur dan aktor (Ismail, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyediakan dan mendistribusikan makanan, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan beradaptasi dengan nilai kelembagaan, perilaku penerima manfaat, dan kondisi sosial-ekonomi lingkungan pesantren.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer memberikan nilai tambah teoretis dalam mengevaluasi implementasi Program MBG. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi keberhasilan program sekaligus konsekuensi yang muncul pada tingkat lokal (Creswell, 2018). Dalam konteks Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky, implementasi MBG dapat dipahami sebagai proses yang menghubungkan struktur kebijakan pemerintah dengan budaya pesantren, praktik distribusi makanan, perubahan perilaku konsumsi santri,

serta pengalaman para aktor yang terdampak. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa evaluasi kebijakan yang komprehensif perlu memperhatikan tidak hanya apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga bagaimana struktur kebijakan diterima, diterjemahkan, dijalankan, dan dialami oleh berbagai aktor dalam konteks sosial tertentu.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Jawharot Al Muzakky secara umum telah berjalan efektif. Efektivitas tersebut ditunjukkan oleh terlaksananya proses pendataan, penyediaan, penerimaan, dan distribusi makanan secara relatif teratur melalui koordinasi antara pihak pesantren dan SPPG Sukosari 1. Program MBG juga memperoleh penerimaan positif dari santri, tenaga pendidik, pengelola pesantren, dan wali santri karena memberikan manfaat nyata dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi tanpa menambah beban konsumsi keluarga. Kemampuan pelaksana dalam menyesuaikan mekanisme program dengan kondisi aktual pesantren turut menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan implementasi.

Di samping memberikan manfaat gizi dan sosial, implementasi MBG juga menimbulkan konsekuensi terhadap kehidupan ekonomi dan operasional pesantren. Perubahan pola konsumsi santri menyebabkan berkurangnya intensitas pembelian makanan dan



jajanan di kantin pesantren sehingga berdampak pada penurunan pendapatan unit usaha tersebut. Selain itu, ditemukan persoalan terkait penerimaan terhadap menu tertentu, sisa makanan, dan peningkatan volume sampah kemasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya perlu dinilai berdasarkan ketercapaian tujuan utama program, tetapi juga berdasarkan dampak yang muncul terhadap kelompok dan aktivitas lain di lingkungan implementasi. Oleh karena itu, pengembangan MBG di lingkungan pesantren perlu mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan setempat.

Perspektif empat tingkatan realitas sosial George Ritzer terbukti memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dinamika implementasi MBG. Dimensi makro-objektif menjelaskan struktur kebijakan, mekanisme kelembagaan, dan koordinasi antara pesantren dengan SPPG; dimensi makro-subjektif menunjukkan nilai, penerimaan, dan dukungan sosial terhadap program; dimensi mikro-objektif menggambarkan praktik distribusi serta perubahan perilaku konsumsi santri; sedangkan dimensi mikro-subjektif menjelaskan persepsi dan pengalaman para aktor yang terlibat. Keterkaitan keempat dimensi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi MBG merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi antara struktur kebijakan dan tindakan aktor dalam konteks kelembagaan tertentu (Ritzer, 2011).

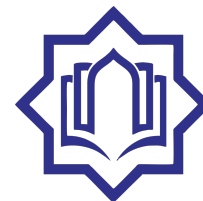
Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Program MBG di pesantren perlu dipahami sebagai kebijakan multidimensional, bukan semata-mata sebagai mekanisme penyediaan makanan bergizi. Keberhasilan program perlu dipertahankan melalui penguatan koordinasi dan dukungan sosial, sementara konsekuensi terhadap unit usaha mikro, preferensi makanan, dan lingkungan perlu menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan gizi dalam lingkungan pesantren dapat menghasilkan manfaat sekaligus konsekuensi yang berbeda pada setiap tingkatan realitas sosial. Temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pengelola program untuk mengembangkan implementasi MBG yang lebih adaptif, kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan sesuai karakteristik lembaga pendidikan penerima manfaat.

Daftar pustaka

- Adhantoro, M. S., Haq, F. A., Hartanto, D., & Sudaryanto, A. P. (2026). IndoBERT-based sentiment analysis of electric motorcycle policy in Indonesia using Instagram data. *Jurnal Penelitian Sains Teknologi*, 165–181.
- Agustin, I., Damayanti, E., Ardiani, A. N., Hasibuan, H. A., Assyfa, V. N., & Arika, R. (2026). Strategi integrasi program makan bergizi gratis dengan sistem ketahanan pangan untuk mengatasi masalah stunting dan malnutrisi. *Jurnal Medika: Medika*, 5(1), 926–934.



- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368.
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780.
- Azzahra, N., Dharmawan, A. D., Mardatilah, A. F., Habibi, M. I., & Aryani, V. A. P. (2025). Pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di SMP Negeri 4 Tangerang: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5036–5044.
- Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2025). *Undang-undang (UU) Nomor 401 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan program makan gratis tahun anggaran 2026*.
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Kusuma, N. A., & Hadji, K. (2026). Implementasi program makan bergizi gratis: Evaluasi pelaksanaan dan tantangan operasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Bundy, D., Burbano, C., Grosh, M., Gelli, A., Jukes, M., & Drake, L. (2009). *Rethinking school feeding: Social safety nets, child development, and the education sector*. World Bank.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darma Dirawan, G., & Sukriadi, A. (2026). Beyond school feeding: Makan Bergizi Gratis (MBG) as a life-course nutrition and human capital policy in Indonesia. *Pinisi Journal of Education*, 6(2).
- Fahrian, Z., & Putra, M. A. P. (2026). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban risiko pelaksanaan program makan bergizi gratis pada skema kemitraan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(2).
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi, dan solusi untuk ketahanan pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21.
- Furkan, I. M., Sari, R. A., Eliza, M. F., Nofrizal, D., Junva, F., Gistituati, N., & Anisah, A. (2025). Mewujudkan makan bergizi gratis: Perspektif guru SD dalam implementasi kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 919–927.
- Habibah, S. A., & Nurmasitah, S. (2026). Persepsi siswa sebagai indikator evaluasi program makan bergizi gratis di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 7(2), 604–610.
- Hastuti, R., & Hariyadi, A. M. (2026). Implementasi program makan bergizi gratis di sekolah: Tinjauan literature terhadap tantangan tata kelola dan implikasi kebijakan. *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 8(1), 16–21.
- Ismail, I. (2024). *Pendekatan kualitatif*. Kedeputan Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional. (2025). *Pedoman umum sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis*.



- Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Rasionalisme dalam kebijakan publik: Analisis dampak program makan bergizi gratis terhadap kesejahteraan pelajar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969–1976.
- Manalu, D. S. T., Labibah, L. A. A., Khoirunisa, A., Hamdi, M., Situmorang, T. M., Zahrani, F. A., ... & Rabbani, W. A. (2026). Evaluasi persepsi kepuasan program makan bergizi gratis melalui media visual infografis: Studi pada siswa di Kota Bogor. *Journal of Food System and Agribusiness*, 16–30.
- Maryani, M., & Syahputra, B. A. (2025). Manajemen pengambilan keputusan berbasis AHP-SAW dalam evaluasi efektivitas program makan bergizi gratis pada anak usia sekolah. *MBIA*, 24(2), 142–168.
- Mozin, S. Y., Tantu, R., Olii, T. P. A., Kaharu, R. K. J., & Van Gobel, S. (2026). Pengelolaan sumber daya manusia dalam implementasi program makanan bergizi gratis: Studi kualitatif pada SPPG di Bone Bolango. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6320–6328.
- Muchlis, K. R., & Siswanto, A. (2026). Evaluasi penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) pada Dapur SPPG Ar-Raudlah Karangpring Sukorambi Jember. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(2), 3104–3116.
- Nasir, R., Baso, B. T., Amrillah, R., & Plaikari, R. P. (2026). Implementasi kebijakan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah: Analisis tata kelola, akuntabilitas, dan koordinasi aktor. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(2), 2548–2553.
- Orbawati, E. B., Mukti, A., Aufa, R., Karunia, I., & Ikhtiara, S. (2025). Policy to practice gap dalam program makan bergizi gratis: Studi SWOT di Magelang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(4), 797–810.
- Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866.
- Risnawati, E., Suriansyah, A., & Harsono, A. M. B. (2026). Implementasi program makan bergizi gratis dalam peningkatan efektivitas proses pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(4), 832–842.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Sakina, N., Wajidi, F., & Rasyid, M. R. (2025). Evaluasi algoritma KNN dan Naive Bayes untuk analisis sentimen kebijakan program makan bergizi gratis. *Jambura Journal of Informatics*, 1(2), 83–97.
- Saputri, A. A., & Utari, D. M. (2026). Efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) terhadap status gizi, kesiapan belajar, dan luaran pendidikan peserta didik: Tinjauan sistematis. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 14(1), 35–48.
- Septiana, N. N. Z. K. S. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik:*



- Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(4).
- Serang, A. E., Bolang, A. S. L., & Lopian, S. L. J. (2025). Evaluasi kualitatif logistik dan distribusi dalam program makan siang bergizi gratis: Studi kasus instrumental di Sekolah Menengah Atas Negeri, Kota Bitung, Indonesia. *Jurnal Promotif Preventif*, 8(6), 1807–1814.
- Udiana, G. K., Pramana, I. B. N. T., & Sari, I. A. P. W. I. (2025). Analisis yuridis normatif standar kualitas dan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis: Evaluasi implementasi dan kerangka hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Dharmaputra Hukum Kesehatan*, 1(2), 27–31.
- Wahyuni, E. T., WD, S. M., & Novyanti, B. M. (2026). Evaluasi dampak program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan gizi anak: Scoping review. *Jurnal Madani Medika*, 16(2), 112–121.
- Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4), 1727–1736.
- World Food Programme. (2024). *School meal programmes in 2024: Scale, coverage and trends*.
- Wulandari, T. A. A. (2026). Analisis implementasi program makan bergizi gratis pada kelompok B di TK Islam Lutfiah Ogan Ilir. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, (2).
- Zenebe, M., Gebremedhin, S., Henry, C. J., & Regassa, N. (2018). School feeding program has resulted in improved dietary diversity, nutritional status and class attendance of school children. *Italian Journal of Pediatrics*, 44(1).
<https://doi.org/10.1186/s13052-018-0449-1>